



Kebijakan Pengetesan Kemiskinan sebagai Strategi Penurunan Stunting: Pendekatan Ekonomi Politik

Yessy Ramawati Shaputri^{1*}, Muhammad Ikhzwan², Naldi Sapril³

¹⁻³Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Korespondensi penulis: yessyramawatis@gmail.com*

Abstract. *Stunting is a type of long-term childhood malnutrition that is closely linked to socioeconomic conditions and poverty. The purpose of this study is to look at strategies to reduce stunting in Indonesia using a political economy approach. To achieve this goal, a literature review method was used. The results show that there are many factors that influence stunting, including health issues and inequalities in power distribution, resource allocation and social structure. Through specific interventions (such as the First 1000 Days of Life program) and sensitive interventions (such as the provision of clean water, sanitation, education, and social protection), poverty alleviation policies are essential to reduce the prevalence of stunting. However, decentralization, poor coordination between sectors, and lack of public awareness often hinder policy implementation. To tackle stunting sustainably, the political economy approach emphasizes the need for clear political alignment, strengthened institutional capacity, and cross-sectoral integration. Stunting is a type of long-term childhood malnutrition that is closely linked to socioeconomic conditions and poverty. The purpose of this study is to look at strategies to reduce stunting in Indonesia using a political economy approach.*

Keywords: *Poverty Alleviation, Political Economy, Stunting.*

Abstrak. Stunting adalah jenis malnutrisi jangka panjang pada anak yang terkait erat dengan kondisi sosial ekonomi dan kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat strategi untuk mengurangi stunting di Indonesia dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik. Untuk mencapai tujuan ini, metode review literatur digunakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang memengaruhi stunting, termasuk masalah kesehatan dan ketidaksamaan dalam distribusi kekuasaan, alokasi sumber daya, dan struktur sosial. Melalui intervensi khusus (seperti program 1000 Hari Pertama Kehidupan) dan intervensi sensitif (seperti penyediaan air bersih, sanitasi, pendidikan, dan perlindungan sosial), kebijakan pengentasan kemiskinan sangat penting untuk mengurangi prevalensi stunting. Namun, desentralisasi, koordinasi yang buruk antar sektor, dan kurangnya kesadaran masyarakat seringkali menghalangi pelaksanaan kebijakan. Untuk menanggulangi stunting secara berkelanjutan, pendekatan ekonomi politik menekankan bahwa keberpihakan politik yang jelas diperlukan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan integrasi lintas sektor. Stunting adalah jenis malnutrisi jangka panjang pada anak yang terkait erat dengan kondisi sosial ekonomi dan kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat strategi untuk mengurangi stunting di Indonesia dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik.

Kata Kunci: Pengentasan Kemiskinan, Ekonomi Politik, Stunting.

1. PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu bentuk keterlambatan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linier pada balita sehingga menyebabkan tidak tercukupinya akumulasi nutrisi sejak kehamilan hingga usia 24 bulan. Kurangnya gizi pada masa tumbuh kembang anak sejak dini akan menghambat perkembangan fisik, perkembangan intelektual bahkan dapat berujung pada kematian. Dinas Kesehatan Kepri menyebutkan kasus stunting di wilayah tersebut mencapai 17%. Kepala Dinas Kesehatan Kepri mengatakan, angka stunting tersebut berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia Wilayah Kepri tahun 2021 yang dihitung berdasarkan status anak di bawah 5 tahun.

Masalah stunting merupakan kondisi dimana perkembangan anak lambat akibat kurangnya pengetahuan orang tua mengenai model pengasuhan anak yang baik. Teladan orang tua sangat penting untuk memastikan anak mencapai pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan yang lebih baik. Konstruksi sosial di bidang stunting mengkaji hubungan antara bagaimana kesehatan anak bergantung pada kebiasaan orang tua dengan belum optimalnya pengawasan gizi yang dilakukan oleh otoritas kesehatan. Salah satu cara untuk mengurangi stunting adalah dengan menerapkan DASHAT (Dapur Sehat) dengan menyediakan makanan sehat dan bergizi, meningkatkan kesadaran pada ibu hamil, ibu menyusui, calon pengantin, mertua dan keluarga yang memiliki anak dibawah dua tahun.

Tujuan dari program memasak sehat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang penurunan dan pencegahan stunting pada balita. Memasak sehat mencakup pendidikan tentang nutrisi penting bagi bayi dan pola makan ibu hamil. Untuk mengurangi stunting di kota Tanjungpinang, Pemerintah kota Tanjungpinang melakukan program pemberian tablet penambah darah dan makanan bergizi terhadap remaja putri dan ibu hamil, persalinan oleh tenaga Kesehatan, dan pemenuhan gizi pada bayi 2 tahun. Ibu yang baru melahirkan di harapkan untuk memberi ASI Eksklusif, pemberian ASI dini, ASI tambahan terhadap anak di bawah umur, memberi imunisasi lengkap atau system kekebalan tubuh dengan vitamin A.

Malnutrisi yang berkepanjangan, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan, dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan. Anak-anak yang pernah mengalami pengalaman ini tampak lebih kecil dibandingkan teman sebayanya. Kondisi ini biasa disebut stunting. Tiga dari sepuluh dari 4.444 anak di bawah usia lima tahun menderita gangguan pertumbuhan (UNICEF, 2018). Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalinga bayi terdapat 71.121 bayi dan 60.358 bayi (84,9%) ditimbang teratur. Jumlah balita gizi buruk sebanyak 2.401 (4%), dan kasus gizi buruk sebanyak 56 orang, dimana 4.444 diantaranya dirawat (Muthia & Yantri, 2019). Kementerian Kesehatan menargetkan penurunan angka stunting dalam RPJMN dari 27,7% menjadi 14% antara tahun 2020 dan 2024. (Pourboati dkk., 2020).

Salah satu masalah utama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia adalah kemiskinan. Indonesia termasuk dalam negara berkembang yang memiliki banyak penduduk miskin yang perlu dituntaskan dan dicari jalan keluarnya. Saat ini, kemiskinan sudah menjaadi masalah Pembangunan yang memiliki banyak aspek dan dapat diidentifikasi dengan mudah dan ditandai dengan kondisi ekonomi yang buruk, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan, serta tingginya tingkat pengangguran, yang menyebabkan ketimpangan pendapatan dan perbedaan antargolongan penduduk. Kemiskinan dapat diidentifikasi sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama makanan dan

pakaian. Kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut adalah dua konsep umum tentang kemiskinan.

Kemiskinan absolut terdiri dari dua kategori: kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan tambahan (Hendra, 2010). Kemiskinan relative artinya tidak ada batas kemiskinan yang jelas. Sebagai analogi, seseorang yang tinggal di Kawasan elit memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, tetapi tetap jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan orang-orang di sekitarnya. Orang atau keluarga tersebut merasa dirinya masih miskin. Kemiskinan ini lebih dipengaruhi oleh lingkungannya. Konsep kemiskinan, baik kemiskinan absolut maupun kemiskinan relative, mengacu pada kepemilikan materi yang terkait dengan standar kelayakan hidup seseorang atau keluarga.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan literatur review untuk mencari tau bagaimana strategi penurunan stunting. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa gizi buruk, sosial, dan ekonomi adalah salah-satunya faktor yang menyebabkan stunting di Indonesia. Namun, di era saat ini yang dipenuhi dengan kemajuan teknologi, status gizi buruk tidak hanya dialami oleh keluarga. Faktor-faktor yang memengaruhi gaya hidup modern menyebabkan pola makan yang tidak sehat. Perubahan gaya hidup, budaya, dan lingkungan yang terjadi di era modern menambah kesulitan dalam mengatasi stunting. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki masalah stunting di Indonesia di era modern.

2. METODE PENELITIAN

Metode literatur review adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik tertentu. Metode ini sering digunakan dalam penelitian akademis untuk memberikan gambaran mendalam tentang pengetahuan saat ini, menemukan celah dalam penelitian, dan merumuskan pertanyaan penelitian baru. Tujuan dari metode literatur review adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis faktor-faktor yang membentuk dasar penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan ekonomi politik sangat erat kaitannya dengan kebijakan pengentasan kemiskinan sebagai strategi penurunan stunting di Indonesia karena faktor kesehatan dan sosial ekonomi adalah faktor yang memengaruhi stunting. Gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kekurangan nutrisi yang berkelanjutan, terutama selama seribu hari pertama kehidupan. Ini memiliki efek jangka panjang pada perkembangan kognitif, prestasi belajar, dan penurunan produktivitas dan pendapatan di masa depan. Kondisi ini memperparah kemiskinan dan

mengancam keberlanjutan generasi mendatang, sehingga perawatannya harus terintegrasi dan lintas sector. Untuk menanggulangi stunting, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan, termasuk intervensi spesifik di sektor kesehatan dan intervensi sensitif yang menyorot faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan, pendidikan, dan pendapatan keluarga.

Program 1000 Hari Pertama Kehidupan adalah contoh intervensi spesifik, termasuk pemberian ASI eksklusif, imunisasi, dan pemantauan perkembangan anak. Kebijakan penanggulangan stunting Indonesia didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan terkait kesehatan, pangan, dan sanitasi. Dokumen perencanaan nasional seperti RPJPN 2005–2025, RPJM 2015–2019, dan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi adalah contoh dari dokumen ini. Kebijakan ini membutuhkan komitmen politik dari pemimpin tertinggi negara, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan partisipasi dari pemerintah daerah hingga tingkat desa. Salah satu pendekatan utama adalah konvergensi program, di mana berbagai sektor seperti kesehatan, pertanian, pendidikan, dan perlindungan sosial diarahkan untuk saling mendukung untuk mengurangi stunting, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Dalam praktiknya, penurunan stunting menjadi bagian dari agenda besar pembangunan nasional. Pemerintah pusat telah menetapkan target ambisius dalam RPJMN dan mengalokasikan dana dalam jumlah besar, termasuk insentif fiskal untuk pemerintah daerah. Namun pendekatan desentralisasi dalam implementasi kebijakan ini seringkali menimbulkan tantangan baru berupa koordinasi antar lembaga, perbedaan kapasitas daerah, dan inkonsistensi pelaksanaan program. Ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan memerlukan konsistensi politik dan kelembagaan yang kuat agar benar-benar berdampak. Untuk menekan angka stunting, strategi ekonomi politik juga menekankan pentingnya sistem respons berbasis masyarakat. Ini karena kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dalam menjaga gizi seimbang, sanitasi, dan kebersihan lingkungan sangat penting.

Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tujuan pembangunan, tetapi juga menjadi alat penting untuk memecahkan rantai stunting melalui peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar. Kebijakan pengentasan kemiskinan sebagai strategi penurunan stunting di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pendekatan ekonomi politik, karena stunting tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kesehatan, tetapi juga oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Stunting merupakan masalah gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama selama 1000 hari pertama kehidupan, dan berdampak jangka panjang pada perkembangan kognitif, prestasi

belajar, hingga penurunan produktivitas dan pendapatan di masa depan. Kondisi ini memperparah kemiskinan dan mengancam keberlanjutan generasi mendatang, sehingga penanganannya harus dilakukan secara lintas sektor dan terintegrasi.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk menanggulangi stunting, baik melalui intervensi spesifik di sektor kesehatan maupun intervensi sensitif yang menyangkut faktor-faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan, pendidikan, dan pendapatan keluarga. Intervensi spesifik difokuskan pada program 1000 Hari Pertama Kehidupan, termasuk pemberian ASI eksklusif, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak. Sementara itu, intervensi sensitif dilakukan melalui peningkatan akses air bersih, sanitasi, serta program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang bertujuan memperbaiki lingkungan hidup dan meningkatkan daya beli keluarga miskin terhadap pangan bergizi.

Kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia diatur dalam berbagai dokumen perencanaan nasional seperti RPJPN 2005–2025, RPJM 2015–2019, dan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi, serta didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan terkait kesehatan, pangan, dan sanitasi. Pelaksanaan kebijakan ini menuntut komitmen politik dari pimpinan tertinggi negara, koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta keterlibatan pemerintah daerah hingga tingkat desa. Salah satu pendekatan utama adalah konvergensi program, di mana berbagai sektor seperti kesehatan, pertanian, pendidikan, dan perlindungan sosial diarahkan untuk saling mendukung dalam upaya menurunkan prevalensi stunting, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Strategi ekonomi politik dalam penurunan stunting juga menekankan pentingnya sistem respons berbasis masyarakat, karena kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga gizi seimbang, sanitasi, dan kebersihan lingkungan menjadi modal utama untuk menekan angka stunting. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tujuan pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memutus rantai stunting melalui peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan akses terhadap layanan dasar. Kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan, didukung oleh regulasi yang jelas dan akuntabilitas pelaksanaan di semua tingkatan pemerintahan, menjadi kunci dalam menurunkan stunting dan membangun generasi Indonesia yang sehat dan produktif.

Stunting sebagai bentuk malnutrisi kronis pada anak bukan semata persoalan kesehatan, tetapi erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi, khususnya kemiskinan. Pendekatan ekonomi politik dalam memahami strategi penurunan stunting menekankan bahwa kebijakan yang diarahkan untuk mengurangi prevalensi stunting tidak dapat dilepaskan dari konteks

distribusi kekuasaan, alokasi sumber daya, dan struktur sosial yang melingkupinya. Kemiskinan memainkan peran sentral dalam memperburuk situasi stunting di Indonesia. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan memiliki keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, pelayanan kesehatan dasar, sanitasi layak, dan informasi gizi yang memadai. Situasi ini menjadikan anak-anak dari keluarga miskin lebih rentan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan.

Maka dari itu, kebijakan pengurangan stunting harus dilihat bukan hanya dari aspek gizi dan medis, tetapi juga dari sisi ketimpangan ekonomi dan sosial. Secara historis, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan banyak kebijakan dan regulasi untuk menanggulangi stunting, baik dalam bentuk intervensi spesifik seperti program 1000 Hari Pertama Kehidupan, maupun intervensi sensitif seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan program pengentasan kemiskinan. Namun, seperti yang diungkap dalam kajian oleh Saputri dan Tumangger, serta Nisa, meskipun di level kebijakan sudah tersedia berbagai kerangka strategis dan anggaran besar, efektivitas implementasinya belum maksimal di tingkat akar rumput. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami secara mendalam apa itu stunting, penyebabnya, dan cara mencegahnya.

Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan makro dan praktik mikro di lapangan. Dalam praktiknya, penurunan stunting menjadi bagian dari agenda besar pembangunan nasional. Pemerintah pusat telah menetapkan target ambisius dalam RPJMN dan mengalokasikan dana dalam jumlah besar, termasuk insentif fiskal untuk pemerintah daerah. Namun pendekatan desentralisasi dalam implementasi kebijakan ini seringkali menimbulkan tantangan baru berupa koordinasi antar lembaga, perbedaan kapasitas daerah, dan inkonsistensi pelaksanaan program. Ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan memerlukan konsistensi politik dan kelembagaan yang kuat agar benar-benar berdampak.

Di sisi lain, dibandingkan dengan Filipina yang menerapkan sistem yang lebih terpusat, kebijakan desentralistik Indonesia menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif. Jika tidak, kebijakan akan berhenti di atas kertas dan tidak menyentuh persoalan nyata di masyarakat. Penanggulangan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan dengan pendekatan yang terfokus, terukur, dan adaptif terhadap kondisi lokal. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan sebagai strategi penurunan stunting tidak hanya menuntut kebijakan yang teknokratis, tetapi juga memerlukan keberpihakan politik yang jelas pada kelompok miskin, penguatan kapasitas pelaksana kebijakan, serta kesadaran kolektif bahwa stunting adalah persoalan mendesak yang

menyangkut masa depan bangsa.

Pendekatan ekonomi politik membantu melihat bahwa keberhasilan penanggulangan stunting tidak cukup hanya dari sisi teknis, melainkan juga sangat bergantung pada bagaimana negara mengelola kekuasaan, sumber daya, dan keadilan distribusi bagi rakyatnya. Untuk mengurangi stunting dan menghasilkan generasi yang sehat dan produktif di Indonesia, kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan, didukung oleh regulasi yang jelas dan akuntabilitas pelaksanaan di semua tingkatan pemerintahan, sangat penting. Stunting, yang merupakan jenis malnutrisi jangka panjang pada anak, tidak hanya masalah kesehatan; itu terkait erat dengan kondisi sosial ekonomi, terutama kemiskinan. Untuk memahami strategi penurunan stunting, pendekatan ekonomi politik menekankan bahwa distribusi kekuasaan, alokasi sumber daya, dan struktur sosial adalah bagian penting dari kebijakan. Keadaan stunting di Indonesia semakin memburuk karena kemiskinan.

Keluarga yang hidup dalam kemiskinan sulit mendapatkan makanan bergizi, layanan kesehatan dasar, sanitasi yang memadai, dan informasi tentang nutrisi. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga miskin lebih rentan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan karena kondisi ini. Oleh karena itu, untuk mengurangi stunting, kebijakan harus mempertimbangkan ketimpangan ekonomi dan sosial serta masalah gizi dan medis. Dengan demikian, pengetatan kemiskinan sebagai strategi penurunan stunting tidak hanya menuntut kebijakan yang teknokratis, tetapi juga memerlukan keberpihakan politik yang jelas pada kelompok miskin, penguatan kapasitas pelaksana kebijakan, serta kesadaran kolektif bahwa stunting adalah persoalan mendesak yang menyangkut masa depan bangsa. Pendekatan ekonomi politik membantu melihat bahwa keberhasilan penanggulangan stunting tidak cukup hanya dari sisi teknis, melainkan juga sangat bergantung pada bagaimana negara mengelola kekuasaan, sumber daya, dan keadilan distribusi bagi rakyatnya.

4. KESIMPULAN

Stunting di Indonesia adalah masalah serius yang berkaitan dengan kesehatan dan kondisi sosial ekonomi, terutama kemiskinan. Studi ini menunjukkan bahwa kemiskinan adalah faktor utama yang menyebabkan stunting menjadi lebih parah, karena keluarga miskin sering mengalami akses yang terbatas terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, sanitasi yang memadai, dan informasi tentang nutrisi yang tepat. Oleh karena itu, rencana penurunan stunting harus memasukkan intervensi khusus dan sensitif serta mempertimbangkan elemen ekonomi dan sosial.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengatasi stunting melalui kebijakan seperti program 1000 Hari Pertama Kehidupan dan regulasi kesehatan dan pangan. Namun, tantangan seperti perbedaan antara praktik mikro di lapangan dan kebijakan makro menantang keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Masalah koordinasi lembaga dan perbedaan kapasitas daerah sering terjadi ketika pendekatan pelaksanaan kebijakan yang desentralisasi diterapkan.

Akibatnya, konsistensi politik dan kelembagaan yang kuat diperlukan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga sanitasi dan gizi seimbang. Strategi penurunan stunting harus mencakup penentasan kemiskinan, dengan penekanan pada peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan akses terhadap layanan dasar. Keberhasilan penanggulangan stunting juga bergantung pada kebijakan teknis, tetapi juga pada manajemen kekuasaan, alokasi sumber daya, dan distribusi yang adil bagi masyarakat. Diharapkan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang sehat dan produktif serta mengakhiri rantai kemiskinan dan stunting melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu kami membahas kebijakan pengetesan kemiskinan sebagai cara untuk mengurangi stunting di Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada Dinas Kesehatan dan lembaga terkait yang telah memberikan data dan informasi yang sangat berharga. Selain itu, kami berterima kasih kepada para peneliti dan akademisi yang telah melakukan penelitian sebelumnya, yang telah memberikan landasan penting bagi pemahaman kami tentang masalah kemiskinan dan stunting. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada komunitas yang telah aktif berpartisipasi dalam program kesehatan dan gizi, serta kepada semua orang yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Kami berharap kerja sama dan komitmen kita semua dapat berlanjut untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan. Terima Kasih.

DAFTAR REFERENSI

- Adella, P. S., & Rizky, R. N. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 3(1), 29–36.
- Budiasa, A. A. G. R., Raka, A. G., & Mardika, I. M. (2019). Implementasi kebijakan padat karya tunai (PKT) pada masyarakat miskin di Desa Lebih, Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 71–82.

- Edon, Y. (2019). Ekonomi politik media dalam pemberitaan kasus korupsi. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(2), 71–79.
- Hendrayanti, S., & Sari, C. T. (2023). Potential of Land and Building Transfer Tax (BPHTB). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 7(4), 1365–1375.
- Latifa, S. N. (2018). Kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(2), 173–179.
- Maulana, F., & Silitonga, M. S. (2023). Intervensi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di desa. *Journal Publicuho*, 6(4), 1393–1410.
- Priyono, P. (2020). Strategi percepatan penurunan stunting perdesaan (Studi kasus pendampingan aksi cegah stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Good Governance*, 16(2), 149–174. <https://doi.org/10.32834/gg.v16i2.198>
- Purwanti, A. R., Widyastuti, T. M., & Suminar, Y. A. (2022). Kebijakan dan strategi pencegahan dan penanganan stunting. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1–48.
- Rogahang, A. L., Tulus, F. M. G., & Palar, N. R. A. (2023). Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(4), 403–419.
- Saragih, J. P. (2015). Kebijakan pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Government policy to reduce poverty in the Special Region of Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 45–59.